
***Survival Strategy* Korea Utara Melalui KTT Korea Utara-Amerika Serikat 2018 (Studi Kasus: Perubahan Sikap Korea Utara Terhadap Perjanjian Denuklirisasi)**

Himawari Luckies Romanto¹⁾, Penny Kurnia Putri²⁾, A.A. Bagus Surya Widya Nugraha³⁾

^{1,2,3)} Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Abstrak

Korea Utara memiliki dual kebijakan, *nuclear power* dan ketahanan ekonomi yang berjalan bersamaan. Namun ditengah menjalankan kebijakan nuklirnya, Korea Utara harus menanggung krisis ekonomi dan pangan yang membuat Korea Utara semakin mengembangkan nuklirnya sebagai bentuk pertahanan negara. Memanasnya situasi di Semenanjung Korea turut membuat Korea Utara kian agresif melakukan uji coba misil dengan jangkauan yang dapat membahayakan negara lain. Akhirnya, berbagai pihak internasional menjatuhkan sanksi ekonomi serta embargo kepada Korea Utara untuk menekan program nuklirnya, terutama Amerika Serikat (AS). Pada 2018, Korea Utara bersedia duduk di meja perundingan bersama AS untuk membahas denuklirisasi Korea Utara. Sikap Korea Utara tersebut menimbulkan banyak pertanyaan bagi berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan *survival strategy* Korea Utara melalui perubahan gaya diplomasi Kim Jong Un sebagai pemimpin negara dalam melakukan negosiasi denuklirisasi dengan AS pada KTT Jong Un-Trump 2018. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan *Chicken Game Theory* dan *Rational Actor Model*. Berdasarkan interpretasi hasil olah data, penulis mengidentifikasi bahwa sikap *swerve* Korea Utara merupakan bentuk *survival strategy* yang telah melalui perhitungan *cost-benefit*. Penyetujuan pengurangan kegiatan program nuklir oleh Korea Utara merupakan pilihan paling menguntungkan. Tindakan tersebut secara implisit tidak hanya akan mengurangi aktifitas militer AS di Semenanjung Korea, tapi janji pengurangan sanksi ekonomi AS juga akan memulihkan krisis ekonomi Korea Utara. Melakukan *swerve* bukan berarti Korea Utara kehilangan kepentingannya, justru Korea Utara sedang berusaha memulihkan kondisinya untuk bertahan ditengah krisis demi pencapaian *power* yang lebih besar.

Kata-kunci : Amerika Serikat, Denuklirisasi, Korea Utara, Pilihan Rasional, *Survival Strategy*

Abstract

North Korea has dual policies, nuclear power and economic resilience that go hand in hand. But in the midst of carrying out its nuclear policy, North Korea has to endure an economic and food crisis that makes North Korea increasingly develop its nukes as a form of national defense. The escalating situation on the Korean Peninsula has also made North Korea increasingly aggressive in testing missiles with a range that could endanger other countries. Finally, various international parties imposed economic sanctions and embargoes on North Korea to suppress its nuclear program, especially the United States (US). In 2018, North Korea agreed to sit at the negotiating table with the US to discuss North Korea's denuclearization. North Korea's stance raises many questions for various parties. This study aims to explain North Korea's survival strategy through changes in Kim Jong Un's diplomatic style as the country's leader in denuclearization negotiations with the US at the 2018 Jong Un-Trump summit. The analysis was conducted qualitatively using Chicken Game Theory and Rational Actor Model. Based on the interpretation of the data processing, the authors identify that North Korea's swerve attitude is a form of survival strategy that has been through cost-benefit calculations. Agreeing to reduce the activities of North Korea's nuclear program is the most advantageous option. Such actions would implicitly not only reduce U.S. military activity on the Korean Peninsula, but the promise of easing U.S. economic sanctions would also remedy North Korea's economic crisis. Swerving does not mean North Korea loses its importance, rather North Korea is trying to restore its condition to survive in the midst of a crisis for the achievement of greater power.

Keywords : *Denuclearization, North Korea, Rational Choice, Survival Strategy, United States*

Kontak Penulis

Himawari Luckies Romanto

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Jalan PB Sudirman (Kampus Sudirman) Denpasar, Bali 80234

Telp: +62 (361) 255378; Fax: +62 (361) 255916

E-mail: himawariluckies@gmail.com

PENDAHULUAN

Korea Utara yang dikenal sebagai negara yang sangat tertutup terhadap dunia internasional tiba-tiba memutuskan untuk bersikap terbuka. Perubahan sikap yang banyak menyita perhatian publik ini diawali dengan kesepakatan antara Korea Utara dan Korea Selatan untuk membentuk tim Olimpiade dengan satu bendera "persatuan" dalam rangka menyambut Olimpiade Musim Dingin 2018. Pertemuan tingkat tinggi yang digelar di Panmunjom tidak hanya mendiskusikan tentang pengiriman delegasi olimpiade saja, tapi turut menyinggung perihal relasi kedua negara yang terus bersitegang. Puncaknya, perubahan sikap Korea Utara terlihat pada pertemuan empat mata antara pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump di Pulau Sentosa, Singapura. KTT ini membahas mengenai denuklirisasi Korea Utara, pelucutan senjata nuklir dan peredaan ketegangan di Semenanjung Korea.

Krisis suplai pangan dan ekonomi Korea Utara yang kian meningkat turut memberi pengaruh terhadap perubahan politik luar negeri negara yang dipimpin oleh Kim Jong Un. Dimulai dengan musim paceklik pada tahun 1990-an yang mengakibatkan kelangkaan pangan Korea Utara. Kurangnya curah hujan juga mengakibatkan kelangkaan listrik mengingat Korea Utara sangat bergantung terhadap pembangkit listrik tenaga air. Musim kemarau terburuk bagi Korea Utara ini pada akhirnya menyebabkan Korea Utara harus bergantung pada donor internasional (Dwiantika, 21 Juli 2018).

Hal ini kemudian diperparah dengan perihal embargo bantuan dari Tiongkok dan Rusia yang dikenal sebagai sekutu pemerintah Pyongyang. Pembekuan aset pribadi Kim Jong Un dan larangan pasokan minyak terhadap Korea Utara turut diusulkan oleh Amerika

Serikat. Amerika Serikat kemudian menggerakkan PBB untuk menjatuhkan sanksi berupa larangan ekspor batubara dari Korea Utara pada Agustus 2017. Pada akhir tahun 2017, Amerika Serikat mengajukan rancangan proposal berupa larangan total berbagai produk minyak ke Korea Utara serta larangan ekspor industri tekstil lainnya. Rancangan resolusi yang telah diedarkan kepada anggota Dewan Keamanan PBB ini merupakan tanggapan atas uji coba keenam nuklir Korea Utara dan peluncuran rudal yang terus berulang (BBC, 23 Desember 2017).

Sederet sanksi yang diberikan kepada Korea Utara memungkinkan terjadinya kemerosotan ekonomi yang lebih buruk pada tahun 2018. Hal inilah yang kemudian menjadi perhatian Presiden Amerika Serikat, Donald Trump untuk menjadi alat diplomasi terhadap agenda denuklirisasi Korea Utara. Amerika Serikat kemudian menambah nilai diplomasi tersebut dengan memberlakukan sanksi embargo perdagangan dan keuangan yang mencakup hukuman bagi bank-bank non-Amerika Serikat dan pengusaha yang berbisnis dengan Korea Utara (Dwiantika, 21 Juli 2018). Krisis yang dialami, sanksi-sanksi yang dijatuhkan, serta embargo ekspor-impor dan suplai pada akhirnya menempatkan Korea Utara pada posisi dilema.

Kim Jong Un sebagai kepala negara terjebak diantara dua pilihan yang pelik, konfrontasi dengan kondisi krisisnya atau menghindar dengan denuklirisasi program nuklirnya. Jika Kim Jong Un memilih untuk konfrontasi dengan tidak mengorbankan program nuklirnya, maka krisis yang telah melanda selama bertahun-tahun akan menggerogoti Korea Utara. Sedangkan jika Kim Jong Un mengambil langkah mundur dengan menyetujui tuntutan masyarakat internasional, yaitu denuklirisasi maka Kim Jong Un dengan

kata lain melucuti dirinya sendiri dari senjata diplomasi yang selama ini ia gunakan untuk mencari perhatian negara lain demi mendapatkan suplai atau mitra kerja sama, serta menjaga keamanan wilayah dan rezimnya.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan tiga literatur sebagai kajian pustaka. Pertama, tulisan Atsuhito Isozaki (2017) yang berjudul "*Understanding the North Korean Regime*," membantu penulis dalam memahami rezim Korea Utara yang telah puluhan tahun dikuasai oleh rezim Kim. Korea Utara memiliki ideologi yang kuat dan berbeda dengan negara lain. *Juche*, ideologi Korea Utara yang berarti "kemandirian" dapat dijelaskan dalam empat hal prinsip dasar, yaitu otonomi ideologis, kemandirian politik, kemandirian ekonomi, serta kemandirian dalam pertahanan. Ideologi "kemandirian" ini pula yang kemudian mengarahkan Korea Utara pada cita-cita untuk mengembangkan diplomasi politik independen yang dimaksudkan sebagai kemandirian dalam politik internasional tanpa tunduk pada kekuatan besar. Namun pada akhirnya, prinsip ini akan menjadi kesulitan bagi Korea Utara untuk melindungi dirinya. Maka untuk mengatasi hal ini, Korea Utara harus memusatkan perhatiannya kepada sebuah hal yang dapat membuatnya tidak dapat diremehkan negara lain, membuatnya terlihat kuat, yaitu dengan program pengembangan rudal nuklir (Isozaki, 2017: 15-16).

Literatur kedua yang digunakan adalah tulisan Hong Nack Kim (2012) dengan judul "*The Kim Jong Un Regime's Survival Strategy and Prospects for the Future of North Korea*," yakni mengenai kerangka dan langkah politik Korea Utara untuk bertahan dalam hubungan internasional. Tulisan ini membantu dalam analisis untung dan rugi yang terkandung dalam pilihan-pilihan yang dihadapi Kim Jong Un, serta menjelaskan kepentingan nasional

Korea Utara dalam mengubah pola diplomasinya melalui KTT Jong Un-Trump. Hong Nack Kim (2012: 102) berasumsi bahwa Kim Jong Un memandang program nuklir yang dijalankan oleh Korea Utara sebagai suatu tindakan defensif murni. Pasca keruntuhan ekonomi Korea Utara pada akhir 1990-an menjadikan fokus pengelolaan hubungan perdagangan bilateral dengan negara-negara tertentu tidak dapat diabaikan. Pengalaman dan kelemahan ekonomi ini memperkuat kepekaan para pemimpin Korea Utara terhadap dominasi dari entitas asing, terutama yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Kepemimpinan Korea Utara beranggapan bahwa nuklir kemudian menjadi senjata penting, yang tanpanya kepemimpinan rezim akan terasa rentan terhadap serangan asing sehingga tidak akan mampu untuk mengekstrak bantuan yang cukup dari masyarakat internasional untuk mempertahankan Korea Utara (Kim, 2012: 86).

Selanjutnya literatur ketiga adalah "*OR (Operational research) as rational choice: a decision and Game Theory perspective*," yang ditulis oleh Richard J. Ormerod (2010). Tulisan ini menjelaskan tentang bagaimana aktor membuat keputusan secara rasional, serta keterkaitan antara *Game Theory* dan implementasi *Rational Actor Model*. Keduanya mempunyai instrumen yang sama dan saling berhubungan seperti *options* (analisis keuntungan dan kerugian), *beliefs* (tahap untuk menentukan konsekuensi yang mungkin diambil), *desires* (tahapan untuk menentukan tujuan atau goal melalui alternatif pilihan), *states of nature* (merupakan kompleksitas *nature* atau bisa dikaitkan juga dengan tahap pengumpulan informasi).

Berdasarkan ketiga tinjauan jurnal tersebut, penulis menggunakan *Rational Actor Model* (RAM) dan *Chicken Game Theory* sebagai kerangka pemikiran. *Game theory* umumnya digunakan untuk menganalisis situasi, perilaku,

serta kemungkinan yang akan dipilih oleh aktor. Dalam hubungan internasional, teori ini sering kali digunakan sebagai sebuah strategi yang terkait dengan senjata nuklir, yakni pembuat keputusan bertindak sebagai pemain (*players*) yang aksinya (*action*) bergantung pada rasionalitas pemainnya. Salah satu varian *game theory* *Chicken Game* (Smith dkk, 2018: 12).

Chicken Game umumnya memiliki dua ciri khas, yaitu risiko yang tidak bisa dikendalikan dan rasionalitas. Sehingga, meskipun para pemain seolah bertindak secara rasional, namun risiko yang tidak bisa dikendalikan bisa saja datang jika keduanya sama-sama berpikir bahwa lawan mereka menghindari. Dalam permainan ini, setiap pemain akan berusaha agar lawannya yang akan mengambil keputusan untuk menghindari di detik-detik terakhir dengan tujuan agar ia bisa mengambil keuntungan yang lebih maksimal (Macey, 1989: 49).

Menurut Randall W. Stone (2001), *Chicken Game* biasanya digunakan untuk menganalisis *crisis bargaining* atau proses negosiasi yang sulit dilakukan antara kedua belah pihak (Fadhilillah, 2023: 59). Dalam teori *Chicken Game*, pemain yang memilih untuk berbelok maka akan dikenakan (1) poin sekaligus dianggap sebagai "*Chicken*." Berbeda dengan pemain yang tetap memilih untuk terus berjalan (*straight*), ia akan mendapatkan nilai (4). Namun jika kedua belah pihak sama-sama mengalah, maka masing-masing akan mendapatkan nilai (3) poin. Begitu juga sebaliknya, jika keduanya memilih untuk tetap lurus maka kedua pihak akan sama-sama rugi sehingga akan mendapatkan nilai (0).

Proses pembuatan kebijakan luar negeri tidak terlepas dari *rational decision making model* atau yang lebih dikenal dengan *rational choice theory*. Analisis ini kerap kali digunakan untuk melihat dan menjelaskan bagaimana pilihan dan

perilaku pemimpin dalam menghadapi krisis internasional. Negara digambarkan sebagai aktor rasional yang selalu bertindak didasarkan atas kepentingan dirinya sendiri. (Subakti, 2020: 221-235). Dalam hal ini, kepentingan yang paling mendasar bagi suatu negara adalah menjaga kedaulatan dan mencapai kepentingan nasional. *Rational Actor Model* (RAM) merupakan pendekatan *problem solving* yang bisa digunakan dalam ilmu politik untuk menganalisis pembuatan keputusan dalam situasi yang berisiko. RAM merupakan sebuah model yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian dari sebuah keputusan yang diambil. RAM merupakan pendukung dari *chicken game theory*. Dalam RAM agar mencapai sebuah keputusan selalu berhubungan dengan opsi yang ada dan juga *desires*. Sedangkan *beliefs* terbentuk berdasarkan *desires* aktor (Ormerod, 2010: 1761-1776).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pola *survival strategy* Korea Utara melalui KTT Jong Un-Trump 2018 dalam kerangka perubahan sikap Korea Utara terhadap perjanjian denuklirisasi dari tahun 2003 sampai tahun 2018. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai informasi dan bahan kajian bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi dan tindakan rasional dalam memperoleh keuntungan ekonomi dan menjaga keamanan rezim negaranya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berbasis studi kepustakaan, serta penelusuran data melalui mesin pencari daring. Level analisis yang digunakan penulis adalah level negara, yang menurut perspektif realisme, negara merupakan aktor terpenting dalam sistem internasional yang cenderung akan

mengejar kepentingan pribadi demi meraup sumber kekuatan sebanyak mungkin untuk menghadapi masalah utama negara, yaitu kelangsungan hidup atau *survival*. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data sekunder yang memanfaatkan data kuantitatif yang telah tersedia, kemudian proses analisis dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penulis juga menjelaskan pengorganisasian penyajian data yang didasarkan pada beberapa teknik, yaitu berupa sumber data, kronologi, tematik dan sejarah. Penyajian data dilakukan didukung dengan beberapa gambar, tabel serta grafik yang juga disajikan dalam bentuk teks naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Awal terciptanya ide untuk menciptakan senjata nuklir berawal dari masa pemerintahan Kim Il Sung yang melihat pengalaman bom atom Hiroshima dan Nagasaki yang saat itu mampu menundukkan Jepang. Selain itu, saat perang Korea berakhir, ditemukan beberapa dokumen dari administrasi Truman yang di publikasi pada tahun 1950 yang menyatakan jika diperlukan Amerika Serikat akan mengambil langkah menggunakan senjata nuklir untuk melawan pasukan Korea Utara. Semenjak itu, di tahun 1950, Korea Utara mulai aktif melakukan program penelitian nuklir (Wakefield & Hathaway, 3 November 2010).

Pengembangan nuklir yang cukup pesat terlihat di tahun 2015-2016, karena di tahun tersebut Korea Utara melakukan beberapa tes uji coba nuklir, mulai dari misil Musadan, misil Nodong hingga uji coba nuklir bawah tanah. Hingga di tahun 2017, uji coba misil balistik Korea Utara bisa mencapai 700 km yang diperkirakan dapat mencapai laut Jepang, dan uji coba misil terjauhnya dapat mencapai 6700 km. Korea Utara juga berhasil menciptakan *H-bomb* (*Hydrogen Bomb*), yang masuk ke dalam

golongan *thermonuclear* berdaya ledak besar, bahkan bisa melebihi daya ledak bom atom Hiroshima dan Nagasaki (Wakefield & Hathaway, 3 November 2010).

Keinginan Korea Utara untuk mengembangkan program nuklirnya salah satunya untuk menyaingi pertahanan militer milik Korea Selatan. Walaupun nuklir Korea Selatan tidak memiliki jangkauan misil yang jauh seperti yang dimiliki Korea Utara, namun dengan dukungan Amerika Serikat, Korea Selatan ingin memperjauh jangkauan misilnya hingga 1000 km yang diperkirakan dapat mencapai Rusia. Jika misil itu tercapai maka dengan jangkauan tersebut, mampu menjangkau wilayah Pyongyang (Fadhillah, 2023: 59). Belum lagi ditambah dengan adanya misil THAAD yang didukung oleh Amerika Serikat yang mampu menyerang sistem pertahanan darat Korea Utara. Dengan data tersebut, Korea Utara semakin yakin untuk terus mengedepankan program nuklirnya sekaligus terus memperluas jangkauan misilnya. Namun tantangan terbesar pada agenda pengembangan nuklir terletak pada kecurigaan masyarakat internasional akan nuklir sebagai senjata yang dapat mengancam keamanan. Akibat fokus pada pengembangan nuklir, Korea Utara harus terus mencari cara agar perekonomiannya bisa berkembang ditengah beratnya sanksi ekonomi yang dihadapi (Dewi, 2021: 27-41).

Diplomasi Nuklir Korea Utara

Salah satu kebijakan Korea Utara dalam hal pengembangan ekonomi selama ini terhambat karena adanya aktifitas peningkatan keamanan militer melalui pengembangan proyek nuklir. Korea utara banyak menggunakan proyek uji coba nuklirnya untuk melakukan provokasi. Dengan kebijakan tersebut, Korea Utara yakin bahwa negaranya mampu bertahan sebagai negara bersenjata nuklir (Snyder, 20 November 2013). Namun di

sisi lain hal tersebut juga akan menimbulkan tekanan bagi keadaan ekonomi Korea Utara, apalagi ditengah usaha Korea Utara menaruh perkembangan ekonomi sebagai kepentingannya juga.

Untuk memastikan kelangsungan hidup rezim dibawah kendali Kim Jong Un, ada beberapa ancaman menurut Lankov (2015: 109-150) yang harus dihadapi Korea Utara, salah satunya adalah serangan asing. Saddam Hussein menjadi salah satu contoh bagaimana pihak asing dapat menjadi ancaman negara. Paranoia Kim Jong Un semakin menjadi ketika Pyongyang kerap disamakan dengan Saddam Husein dan Taliban oleh para pejabat Amerika Serikat. Kemudian Muammar Al-Qaddafi, pemimpin Libya menjadi pelajaran berharga bagi Korea Utara bagaimana penyerahan program pengembangan senjata nuklir dapat ditukar dengan tunjangan ekonomi yang dengan murah hati dijanjikan oleh 'Barat'.

Pemaparan Lankov (2009: 2-3) memandang bahwa Kim Jong Un melihat program nuklir sebagai suatu tindakan defensif murni. Kim Jong Un menyadari bahwa setiap serangan Korea Utara yang tidak direncanakan untuk menyerang Korea Selatan atau Amerika Serikat akan berakhir buruk bagi Korea Utara. Namun, Kim juga menganggap bahwa tidak ada kekuatan besar yang akan berisiko menyerang negara nuklir atau campur tangan dalam konflik internal. Karenanya, rezim Kim bertekad untuk tetap mengembangkan nuklir dan menjadikannya sebagai jaminan utama keamanan mereka.

Satu-satunya masalah terbesar yang dihadapi oleh Korea Utara adalah ekonomi yang stagnan. Di Korea Utara, upaya untuk meniru kebijakan "reformasi dan keterbukaan" Tiongkok kemungkinan akan membuat rakyat Korea Utara yang saat ini masih terisolasi dari dunia luar sadar akan kemakmuran Korea

Selatan yang selama ini dianggap tidak dapat dipercaya. Kemudian pada akhirnya rakyat Korea Utara tidak lagi takut terhadap pihak berwenang dan berusaha menuntut kemakmuran layaknya Korea Selatan. Kondisi masyarakat Korea Utara pasca terisolasi inilah ditakutkan akan cenderung menyalahkan rezim keluarga Kim karena praktik "ekonomi kotor" yang telah dijalankan selama puluhan tahun. Kemudian masyarakat Korea Utara mulai menginginkan dan menuntut penyatuan dengan Korea Selatan segera sebagai cara untuk menyelesaikan semua permasalahan krisis Korea Utara (Lankov, 2009: 4-5).

Fluktuasi Hubungan Antara Korea Utara, Korea Selatan dan Amerika Serikat

Pertemuan Panmunjom merupakan pertemuan yang sangat penting bagi pihak Korea Utara dan Korea Selatan. Pertemuan tersebut pertama dilakukan pada 27 April 2018 untuk mengatasi ketegangan yang terjadi di sekitar area Peninsula. Sebelum pertemuan tersebut dilakukan, Korea Selatan telah berusaha untuk menurunkan tensi atau ketegangan dengan pihak Korea Utara dengan mengurangi jumlah pasukan militer Korea Selatan di daerah perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan, guna menunjukkan usahanya untuk menjadikan zona demilitarisasi menjadi zona yang damai. Bahkan Korea Utara juga bersedia untuk melakukan pelucutan senjata untuk mengurangi ketegangan tensi militer antara Korea Selatan dan Korea Utara.

Setelah pertemuan Panmunjom, Korea Utara melakukan pertemuan dengan Tiongkok demi mendapatkan dukungan dan petunjuk untuk menghadapi pertemuan dengan Trump. Setelah Korea Utara melakukan kunjungan ke Tiongkok, pihak Amerika Serikat juga turut melakukan kunjungan ke Korea Utara di hari selanjutnya, yaitu pada tanggal 9 Mei 2018. Pertemuan tersebut juga membahas mengenai

tiga orang Amerika Serikat yang ditangkap oleh Korea Utara. Amerika Serikat meminta Korea Utara untuk melepaskan ketiga orang tersebut sesuai perjanjian sebelumnya (Gaouette, 9 Mei 2018).

Pada tanggal 16 Mei 2018, Korea Utara mengeluarkan pernyataan untuk melakukan penundaan Summit Trump-Kim dikarenakan Korea Utara meragukan prospek dari *summit* tersebut kedepannya (Snyder, 21 Mei 2018). Hal tersebut dipicu oleh latihan gabungan militer antara Korea Selatan dan Amerika Serikat yang dinamai Max Thunder. Sedangkan pihak Amerika Serikat saat itu terus menekan pihak Korea Utara untuk melakukan pembongkaran senjata nuklir yang dianggap hanya diberatkan kepada satu pihak saja, yaitu Korea Utara di tengah Korea Selatan dan Amerika Serikat terus melakukan program latihan militer gabungan. Hal itu kemudian juga memengaruhi keputusan Korea Utara yang menolak daftar jurnalis yang diajukan Korea Selatan dalam acara pembongkaran lokasi uji nuklir Punggyeri pada tanggal 18 Mei 2023. Namun Korea Utara pada akhirnya memperbolehkan jurnalis Korea Selatan pada tanggal 22 Mei 2023 untuk meliput lokasi pembongkaran nuklir Punggyeri. Ketegangan kembali terjadi ketika pihak Amerika Serikat ingin melakukan pembatalan pertemuan dengan Korea Utara saat Korea Utara telah melakukan pembongkaran fasilitas nuklir yang dihadiri oleh banyak jurnalis internasional. Walaupun indikasi pembatalan dari pihak Amerika Serikat terjadi, tetapi pihak Korea Utara tetap bersedia melakukan pertemuan dengan pihak Amerika Serikat.

Kemudian pada tanggal 26 Mei 2018, pihak Korea Utara kembali bertemu dengan pihak Korea Selatan di Tongilgak untuk membahas mengenai langkah agar deklarasi Panmunjom dapat tercapai. Pertemuan tersebut juga membahas agar Korea Utara dan Korea

Selatan dapat terus membangun ikatan yang lebih kuat dan saling mendukung tercapainya *summit* antara pihak Amerika Serikat dan Korea Selatan (Haas & Gambino, 26 Mei 2018). Korea Utara dan Korea Selatan kembali menggelar pertemuan pada 1 Juni 2018 di rumah perdamaian yang terletak di bagian selatan Panmunjom. Di tanggal yang sama juga, pihak Amerika Serikat menyatakan bahwa *summit* dengan pihak Korea Utara akan tetap digelar di Singapura.

Implementasi *Chicken Game Theory* pada Keputusan Korea Utara Terkait Pembatasan Nuklir 2018

Gertakan yang selama ini dilakukan oleh Korea Utara dan Amerika Serikat merupakan salah satu ciri dalam *chicken game theory*, yang dalam teori ini harus mempunyai aksi gertakan dari kedua belah pihak. Dalam gertakan tersebut, Korea Utara sudah memikirkan apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh pihak Amerika Serikat dan begitu juga sebaliknya. Dalam permainan *chicken*, biasanya melibatkan dua belah pihak yang salah satu pihaknya harus melakukan *swerve* atau menghindar saat pihak lain tetap memutuskan *straight* atau terus maju. Dalam konteks Korea Utara dan Amerika Serikat, jika keduanya melakukan *swerve* sangatlah tidak mungkin terjadi, dikarenakan pihak Amerika Serikat merupakan lawan yang sangat kuat dan lebih stabil secara politik, ekonomi maupun keamanan dibandingkan Korea Utara.

Pihak Amerika Serikat bukan hanya sekali mengeluarkan pernyataan terkait dengan uji coba nuklir Korea Utara. Bahkan pernyataan tersebut dirilis berdekatan dengan adanya ledakan dibawah tanah di sekitar Korea Utara yang getarannya mencapai Tiongkok dan Korea Selatan. Mengetahui hal tersebut, Amerika Serikat menyatakan kembali peringatan secara terbuka untuk Korea Utara. Jika Korea Utara

terus melakukan serangan kepada Amerika Serikat dan aliansinya, maka pihak Amerika Serikat akan melakukan respon militer dalam jumlah besar atau secara masif. Selain itu, Amerika Serikat kembali membuat pernyataan "*the United States is considering, in addition to other options, stopping all trade with any country doing business with North Korea*" (Sanger & Choe, 2 September 2017). Pernyataan tersebut mengindikasikan keseriusan jika dilihat dari aksi yang pernah diambil oleh Amerika Serikat sebelumnya.

Pihak Korea Utara pun tidak ingin kalah dengan gertakan Amerika Serikat. Korea Utara cenderung melakukan gertakan melalui uji coba misil yang ditembakkan dekat dengan garis perbatasan aliansi Amerika Serikat. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi pihak aliansi Amerika Serikat yang memang kapan saja bisa terdampak oleh uji coba misil Korea Utara. Pengujian misil berkali-kali merupakan sebuah bentuk gertakan agar pihak Amerika Serikat dan aliansinya berhenti melakukan latihan militer gabungan yang mengancam Korea Utara, serta agar Amerika Serikat berhenti menaruh terlalu banyak pangkalan militer di negara sekitar Korea Utara. Bentuk gertakan dari Korea Utara juga dapat dipahami sebagai bentuk pertahanan akibat rasa *insecurity* Korea Utara yang dikelilingi oleh negara aliansi Amerika Serikat.

Dari serangkaian gertakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, Korea Utara pada akhirnya lebih memilih untuk melakukan *swerve*. Di tahun 2018, pihak Korea Utara tidak mungkin lagi melakukan gertakan seperti sebelumnya, yaitu berupa uji coba nuklir di sekitar Amerika Serikat dan aliansinya. Walaupun begitu, Amerika Serikat justru semakin intens dan serius untuk menerjunkan pasukan perangnya yang berada di pangkalan militer yang ada di Jepang, Korea Selatan dan Guam pada tahun 2018, beberapa bulan sebelum

pertemuan denuklirisasi dengan Korea Utara berlangsung. Pihak Amerika Serikat juga mengatakan tidak akan ragu untuk melakukan penyerangan dengan menargetkan fasilitas pengembangan rudal balistik dan nuklir jika Korea Utara terus melakukan uji coba dan pengembangan nuklir (Tracy, 9 Januari 2018).

Hal tersebut secara otomatis menciptakan probabilitas yang semakin besar untuk Amerika Serikat melakukan serangan terhadap Korea Utara. Posisi Amerika Serikat yang menyatakan bahwa Amerika Serikat menempatkan militernya di beberapa negara sekitar Korea Utara dengan tujuan untuk melindungi negara tersebut dari ancaman Tiongkok dan Korea Utara, maka secara tidak langsung Amerika Serikat tidak akan mungkin melakukan *swerve* karena merasa yang dilakukannya merupakan bentuk *defense* atau pertahanan sekaligus menjaga keamanan di wilayah Asia. Dengan pandangan Amerika Serikat yang menempatkan posisi sebagai pelindung, maka jika Korea Utara tetap melakukan *straight*, besar kemungkinan Amerika Serikat juga tidak takut melakukan invasi secara besar-besaran ke Korea Utara. Oleh sebab itu, Korea Utara melihat bahwa *swerve* dari pihak Amerika Serikat sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi.

Sedangkan jika Korea Utara melakukan *straight* dan Amerika Serikat juga melakukan *straight*, maka kedua belah pihak akan mengalami *lost*. Akan tetapi walaupun sama-sama *lost*, namun *lost* yang akan lebih besar tetap ada di pihak Korea Utara, walaupun dalam *chicken game* itu berarti kedua belah pihak sama-sama mendapatkan nilai (0). Namun nilai (0) yang didapatkan Amerika Serikat tidak akan berdampak sebesar nilai (0) yang didapatkan oleh Korea Utara. Artinya, ketika melakukan perang satu sama lain, Amerika Serikat masih lebih stabil dan siap baik secara politik, ekonomi

maupun pertahanan dibandingkan Korea Utara. Dampak tersebut sangat diperhitungkan oleh Korea Utara apalagi ditengah keadaan negara yang kurang baik secara politik dan ekonomi.

Dari data di atas, maka kemungkinan *payoff* yang paling baik terjadi adalah salah satu pihak melakukan *swerve*, yaitu Korea Utara. Sedangkan Amerika Serikat tetap melakukan *straight*, sehingga dalam hal ini Korea Utara mempertimbangkan beberapa kemungkinan yang akan dilakukan pihak lawan. Maka *swerve* yang akhirnya dilakukan Korea Utara menempatkannya dengan nilai (1), dibandingkan dengan Amerika Serikat yang memang sangat besar kemungkinan melakukan *straight* dan akan mendapat nilai (4).

Kalkulasi *Cost-Benefit* Korea Utara Dalam Pengambilan Keputusan

Keputusan rasional suatu negara yang realis tidak hanya bertumpu pada keputusan untuk berperang namun juga melihat posisi dan kondisi lainnya yang juga menjadi faktor penentu kelangsungan hidup suatu negara seperti politik maupun ekonomi. Tiap langkah terdapat *cost-benefit* yang harus diperhitungkan sebelum mencapai sebuah keputusan dengan risiko yang minimal. Sebelum mengambil keputusan untuk melakukan *payoff* (4,1), Korea Utara terlebih dahulu mempertimbangkan risiko minimum dengan melihat berbagai dinamika situasi yang sedang terjadi saat itu.

Kondisi ekonomi Korea Utara merupakan aspek yang paling terdampak akibat kebijakan Byungjin Korea Utara. Negara tersebut dalam mengangkat pertumbuhan ekonominya harus bergantung ke negara Tiongkok. Meskipun Tiongkok memberikan bantuan melalui kerja sama ekonomi, namun Tiongkok mempunyai tujuan untuk menjaga kestabilan sosial Korea Utara sebagai salah satu mitra di Asia Timur. Selain itu, Tiongkok juga berusaha untuk menjadikan Semenanjung

Korea sebagai bagian dari proyek "*Belt and Road Initiative*," miliknya (Hilpert & Meier, 2018: 28). Dengan tujuan seperti itu, Tiongkok akan punya kecenderungan untuk mencegah terjadinya perang di Semenanjung Korea. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan juga bagi Korea Utara untuk tidak memilih opsi perang. Jika Korea Utara tidak memperhitungkan hal tersebut, dan terjadi serangan di Semenanjung Korea, maka akan sulit bagi Korea Utara untuk meminta bantuan lagi ke Tiongkok.

Akibat dari proyek pengembangan balistik dan nuklir Korea Utara, negara ini harus menanggung strategi "*maximum pressure*" dari Amerika Serikat (Putri, 2021: 64). Strategi itu digunakan Amerika Serikat untuk melemahkan Korea Utara, baik dari segi ekonomi maupun pertahanan militer. Hal itu juga diperkuat berdasarkan pernyataan dari Amerika Serikat bahwa akan menggunakan *deterrence force* untuk menekan Korea Utara agar mau bernegosiasi terkait denuklirisasi. Amerika Serikat juga mengatakan, jika opsi militer sudah terbuka "*locked and loaded*," apabila Korea Utara tetap tidak mau melakukan negosiasi terkait kekuatan nuklir di Semenanjung Korea (France24, 3 September 2017). Hal ini menjadi indikator kerugian yang bisa kapanpun ditanggung oleh Korea Utara akibat serangan militer Amerika Serikat dan juga sanksi internasional.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam mengambil tindakan yang rasional, Korea Utara memiliki beberapa opsi alternatif, sebagai berikut:

Opsi 1. Korea Utara tetap mempertahankan uji coba nuklir dan proyek pengembangan nuklirnya.

Benefit: Korea Utara tetap bisa mencapai kepentingannya membentuk negara dengan keamanan yang berbasis kepemilikan senjata nuklir yang kuat. Sehingga, kedepannya ia tidak perlu merasa terancam atau mudah ditekan oleh

negara besar lainnya yang mempunyai kepentingan yang berseberangan.

Cost: Dalam uji coba nuklir dan pengembangannya, akan ada banyak tekanan dari negara besar lain yang merasa terancam, salah satunya adalah sanksi ekonomi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Korea Utara. Dikhawatirkan jika hal tersebut berlanjut, warga Korea Utara akan melakukan gerakan perlawanan terhadap pemerintahan. Selain itu, embargo bahan pembuat nuklir juga akan mempersulit Korea Utara mendapatkan pasokan bahan baku nuklir, sehingga secara tidak langsung bisa menghambat proyek nuklir Peninsula Korea Utara. Hubungan antara Korea Utara dengan negara lainnya juga akan semakin tegang dan sulit untuk membangun kerja sama. Uji coba nuklir secara langsung bisa memicu aktifitas militer negara di sekitarnya sebagai upaya defensif/deterens.

Opsi 2. Korea Utara tidak melakukan provokasi dan tetap mengembangkan nuklirnya, serta tetap bekerja sama dengan Tiongkok untuk meringankan dampak sanksi ekonominya.

Benefit: Tiongkok yang merupakan sekutu Korea Utara akan memberi keringanan sanksi ekonomi yang sedang dihadapi oleh Korea Utara. Terlebih lagi, Tiongkok merupakan salah satu negara yang memiliki akses agar Korea Utara tetap bisa mendapatkan pasokan untuk proyek nuklirnya ditengah embargo. Dengan melakukan uji dan pengembangan nuklir yang tidak provokatif, secara tidak langsung akan mengurangi kecemasan dari dunia internasional.

Cost: Meskipun keduanya bersekutu, namun Tiongkok tetap mempunyai batasan dalam memberikan bantuan terhadap Korea Utara. Terlebih, Tiongkok memusatkan kebijakannya pada kestabilan keamanan di Semenanjung Korea. Sikap tertutup Korea Utara menempatkan posisi Korea Utara ke dalam belenggu sanksi, kecemasan maupun embargo,

sehingga memiliki hubungan dengan beberapa negara saja tidak cukup untuk memperbaiki kondisi Korea Utara. Walaupun mengembangkan nuklir dengan cara yang tidak provokatif, tapi tanpa adanya sebuah kesepakatan tertulis, maka negara di sekitarnya tetap akan merasa tidak aman dikarenakan selama ini Korea Utara terus berambisi dengan nuklir dan cenderung mudah mengubah kebijakannya. Keadaan tersebut menempatkan Korea Utara pada posisi yang sulit, tekanan internasional akan selalu ada karena rasa *insecure* terkait ambisi nuklir Korea Utara.

Opsi 3. Korea Utara melakukan serangan secara terbuka dan besar-besaran terhadap AS dan aliansinya.

Benefit: Jika melakukan serangan secara terbuka, maka pihak Amerika Serikat akan mendapatkan kerugian akibat serangan militer maupun serangan nuklir dari Korea Utara. Selain itu menghancurkan fasilitas keamanan Amerika Serikat di negara aliansinya tentu akan memberikan kerugian yang besar juga terhadap Amerika Serikat. Negara di sekitar Korea Utara yang bersekutu dengan Amerika Serikat akan menganggap Korea Utara tidak memberikan jalan damai bagi pihak yang menentang Korea Utara dan bisa jadi ada kemungkinan beberapa aliansi Amerika Serikat akan memilih untuk tidak beraliansi dengan Amerika Serikat sebagai akibat dampak dan kerugian dari serangan Korea Utara.

Cost: Jika melakukan serangan terbuka, maka bukan hanya pihak Amerika Serikat dan aliansinya yang akan mendapatkan kerugian, namun pihak Korea Utara juga akan mendapatkan kerugian yang sangat besar akibat serangan balik dari pihak Amerika Serikat dan aliansinya. Kerugian Korea Utara akan lebih parah daripada pihak Amerika Serikat dan aliansinya dikarenakan kondisi ekonomi Korea Utara sangat buruk, yang akan memperparah

dampak serangan. Selain itu, fasilitas pengembangan nuklir Korea Utara akan terdampak paling parah karena pihak Amerika Serikat akan mengincar penghancuran fasilitas tersebut, sehingga akan menggagalkan secara total proyek nuklir Korea Utara. Lebih jauh lagi, negara internasional akan memberikan tekanan dan ancaman yang lebih besar kepada Korea Utara akan membuatnya sulit mengembalikan posisi negara setelah serangan terbuka.

Opsi 4. Melakukan penandatanganan perjanjian terbatas untuk normalisasi kondisi dan posisi Korea Utara.

Benefit: Dengan melakukan perjanjian yang bersifat terbatas maka secara tidak langsung dapat membatasi pergerakan provokatif Amerika Serikat seperti latihan militer gabungan di sekitar wilayah Korea Utara. Menandatangani perjanjian bukan berarti Korea Utara secara total melepaskan proyek pengembangan nuklirnya saat itu juga, melainkan Korea Utara bisa mengesampingkan dulu ambisi nuklirnya untuk memperbaiki kondisi ekonomi negara demi keringanan sanksi ekonomi. Dengan memperbaiki kondisi ekonomi dalam negeri, maka Korea Utara juga dapat mencegah munculnya kelompok perlawanan terhadap pemerintah akibat krisis ekonomi domestik. Opsi ini juga dapat memperbaiki citra Korea Utara di mata internasional, sehingga diharapkan ancaman dari dunia internasional bisa berkurang dan banyak negara yang akan mulai membuka diri untuk menjalin kerja sama dengan Korea Utara. Jika sudah mendapatkan kepercayaan dari dunia internasional, Korea Utara mempunyai kemungkinan tetap bisa melanjutkan proyek nuklirnya walaupun harus bersifat terbatas.

Cost: Korea Utara tidak dapat melakukan gertakan ataupun provokasi seperti yang sebelumnya dilakukan dan hal tersebut secara tidak langsung akan menempatkan posisi

Amerika Serikat dan aliansinya dalam posisi menang, karena selama ini kedua negara saling melakukan gertakan dan provokasi. Korea Utara juga tidak bisa melakukan pengembangan proyek nuklirnya secara masif dan besar-besaran, meski proyek tersebut adalah ambisi terbesar Korea Utara.

Berdasarkan analisis empat opsi di atas, *cost* terkecil adalah opsi melakukan penandatanganan perjanjian. Dengan memilih opsi (4), Korea Utara dapat memperbaiki kondisi ekonomi dalam negerinya, serta melakukan normalisasi hubungan dengan dunia internasional. Pilihan tersebut juga secara perlahan dapat membuka pintu hubungan antara Korea Utara dengan negara-negara lainnya karena selama ini Korea Utara dianggap mengisolasi dirinya dari dunia internasional. Dengan membuka hubungan yang lebih luas, maka diharapkan dapat mengurangi banyaknya ancaman yang selama ini diberikan kepada Korea Utara. Penandatanganan tersebut juga bisa mengurangi sanksi ekonomi yang sedang dihadapi oleh Korea Utara, sebagaimana hal tersebut merupakan salah satu poin yang ingin dicapai oleh Korea Utara.

Pada *assessment consequences (option)*, penulis mengalkulasi *cost-benefit* alternatif pilihan melalui empat opsi yang bisa dilakukan oleh Korea Utara. Sedangkan dalam penentuan *desires*, Korea Utara lebih mengedepankan opsi no. 4 > Opsi no. 2 > opsi no. 1 > opsi no. 3. Setelah menentukan *desires* dari semua opsi tersebut, maka Korea Utara akan menentukan *belief*. *Belief* diartikan sebagai pilihan dengan risiko atau *cost* terkecil dari semua alternatif. Opsi dengan *cost* terkecil, yaitu mengambil keputusan melakukan penandatanganan perjanjian terbatas untuk menormalisasi kondisi dan posisi Korea Utara. Kemudian, *beliefs* inilah yang memengaruhi Korea Utara untuk menentukan pilihan dalam *Chicken Game*, sehingga memutuskan untuk

melakukan *swerve* dengan keuntungan tetap mendapat poin. Sedangkan Amerika Serikat sebagai pihak yang melakukan *straight* dan mendapatkan poin lebih besar. Poin skor yang dipilih oleh Korea Utara merupakan keputusan yang diambil berdasarkan risiko yang terkecil dibandingkan dengan risiko dari opsi-opsi lainnya.

Sebenarnya, kebijakan nuklir Korea Utara dijalankan untuk melegitimasi kekuatan militer Korea Utara di Semenanjung Korea atau lebih condong sebagai proyek keamanan. Dalam perspektif Korea Utara, banyaknya kekuatan militer Amerika Serikat di sekitar Semenanjung Korea dianggap sebagai ancaman besar yang nyata. Oleh karenanya, Korea Utara lebih sering melakukan provokasi untuk menarik perhatian dari komunitas internasional. Penggunaan konflik dalam sebuah perundingan merupakan sebuah strategi yang dilatarbelakangi oleh timpangnya *power* yang dimiliki oleh suatu negara. Sehingga menimbulkan sebuah konflik dianggap menjadi jalan efektif untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dalam perundingan (Putra, 2017: 12). Penulis berargumen bahwa cara provokasi bukan merupakan gertakan yang digunakan Korea Utara untuk memulai perang, melainkan hanya untuk menarik perhatian pihak lawan agar mau menawarkan negosiasi yang lebih menguntungkan untuk Korea Utara.

Melalui negosiasi tersebut, secara tidak langsung Korea Utara bisa menekan ancaman militer dari pihak Amerika Serikat. Selain itu, Korea Utara juga menginginkan pengurangan sanksi dari Amerika Serikat dan PBB agar dapat memenuhi kepentingannya terkait pengembangan ekonomi. Anggaran pemerintah Korea yang juga masuk ke dalam perhitungan ekonomi negara merupakan faktor yang sangat penting. Hal itu penting dikarenakan setiap anggaran pemerintah Korea Utara yang masuk,

juga akan dibagi sebagai anggaran militer untuk pengembangan nuklir Korea Utara.

Dengan menyepakati perjanjian denuklirisasi, Korea Utara bisa secara perlahan memulihkan krisis ekonominya akibat sanksi dari komunitas internasional dan Amerika Serikat. Terlebih Korea Utara memang menganut Byungjin (dual) kebijakan, yaitu nuklir dan pengembangan ekonomi sebagai kesatuan kebijakan yang strategis untuk membangun negara yang *powerful*. Dengan pulihnya perekonomian di Korea Utara, negara ini akan mampu secara perlahan mengembangkan proyek nuklirnya secara diam-diam seperti yang sering kali dilakukan. Melakukan perjanjian denuklirisasi dengan Amerika Serikat bukan berarti Korea Utara kehilangan kepentingan negaranya, namun sebagai negara yang bersifat realis, justru terlihat jika Korea Utara melakukan *swerve* demi meraih kekuatan yang lebih besar lagi dari sebelumnya.

PENUTUP

Sikap Korea Utara yang mendadak berubah merupakan sebuah pilihan rasional negara sebagai aktor utama. Semua aksi provokasi yang dilakukan oleh Korea Utara merupakan bentuk gertakan, sama seperti yang dilakukan oleh pihak Amerika Serikat. Aksi saling gertak yang dilakukan oleh kedua pihak dianalisis melalui *Chicken Game Theory*. Keputusan Korea Utara yang bersedia melakukan pembicaraan tentang perjanjian denuklirisasi menunjukkan sikap *Swerve*, sedangkan pihak Amerika Serikat tetap melakukan *Straight* yang terbukti dengan tercapainya tujuan Amerika Serikat untuk membawa Korea Utara ke meja perundingan. *Payoff* yang didapatkan kedua negara ini, yaitu (4) poin untuk Amerika Serikat yang melakukan *straight*, dan (1) poin untuk Korea Utara yang

melakukan *swerve*. Penyetujuan pengurangan kegiatan program nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara merupakan pilihan yang paling menguntungkan (*high-benefit, low-risk*) dibandingkan tetap bersikeras menutup diri ataupun melakukan serangan terbuka. Opsi tersebut secara tidak langsung dapat sekaligus mengurangi aktifitas militer Amerika Serikat sementara waktu di Semenanjung Korea. Korea Utara juga perlahan dapat memulihkan krisis ekonominya, karena Amerika Serikat berjanji akan mengurangi sanksi ekonomi ke Korea Utara. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan perjanjian denuklirisasi bukan berarti Korea Utara kehilangan kepentingannya, melainkan *swerve* yang dilakukan oleh Korea Utara justru untuk mendapatkan kekuatan-kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya.

Penulis berharap agar pendekatan untuk membawa Korea Utara ke meja perundingan dilakukan penelitian lebih lanjut, mengingat sikap Korea Utara yang mudah berubah dalam sebuah kesepakatan. Pendekatan untuk mengikat komitmen Korea Utara merupakan hal yang krusial untuk diperhatikan agar tidak terjadi peningkatan tensi dan aksi provokasi yang lebih parah lagi. Selain itu perlu juga dilakukan pengurangan aktifitas militer dengan lebih mengedepankan kestabilan wilayah di Semenanjung Korea. Hal ini didasarkan pada sejarah Korea Utara yang cenderung melakukan percepatan uji coba nuklir yang disebabkan karena rasa *insecure* yang diciptakan oleh negara-negara besar di sekitarnya.

Daftar Pustaka

- BBC. (23 Desember 2017). *Uji Rudal Korea Utara, PBB Memberlakukan Sanksi Baru*.
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-42464264> [diakses 23 Maret2020].
- Dwiantika, Nina. 21 Juli 2018. *Ekonomi Korea Utara Mengalami Kontraksi Paling Tajam*.
<https://internasional.kontan.co.id/news/ekonomi-korea-utara-mengalami-kontraksi-paling-tajam> [diakses 20 Juni 2019].
- Fadhilillah, N. 2023. Analisis Payoff Chicken Game Theory Terkait Kebijakan Penyebaran THAAD di Korea Selatan. *Jurnal Hubungan Internasional Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 55-68.
<https://jhii.fisip.unila.ac.id/ojs/index.php/jhii/article/view/21>
- France24.com. (3 September 2017). *North Korea says H-bomb test a 'perfect success'*.
<https://www.france24.com/en/20170903-north-korea-earthquake-suggests-sixth-nuclear-test> [diakses 30 Juni 2023].
- Gaouette, Nicole. 9 Mei 2018. *Pompeo's 13 Hours in North Korea*. CNN.
<https://edition.cnn.com/2018/05/09/politics/mike-pompeo-north-korea-prisoners-tick-tock/index.html> [diakses 10 Agustus 2023].
- Haas, Benjamin & Gambino, Lauren. 26 Mei 2018. *North And South Korean Leaders Meet as US Indicates Summit May Yet Happen*. The Guardian.
<https://theguardian.com/world/2018/may/26/kim-jong-un-moon-jai-in-korean-leaders-hold-surprise-meeting> [diakses 10 Agustus 2023].
- Hilpert, Hanns Günther & Meier, Oliver. 2018. *Facets of the North Korea Conflict*. SWP Research Paper. No. 12.
- Isozaki, Atsuhito. 2017. *Understanding the North Korean Regime*. Washington: Wilson Center.
- Kim, Hong Nack. 2012. The Kim Jong-Un Regime's Survival Strategy and Prospects for the Future of North Korea. *International Journal of Korean Studies*. Vol.XVI, No.2., pp. 81-106.
http://www.icks.org/data/ijks/1482460790_a_dd_file_4.pdf

- Lankov, Andrei. 2009. *North Korea and The Submersive Truth*. Washington: American Enterprise Institute for Public Policy Research.
- Lankov Andrei. 2015. *The Real North Korea: Life and Politics in The Failed Stalinist Utopia*. New York: Oxford University Press.
- Macey, J. R. 1989. *Chicken Wars as Prisoners' Dilemma: What's in the Game?* Book Review.
- Putri, Risalanisa D. 2021. Analysis of the United States' Foreign Policy Towards Denuclearization of North Korea's Nuclear 2017-2021. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, Vol. 7, No. 3, pp. 61-74.
<https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DP/article/view/778/678>
- Ormerod, R. J. Desember 2010. *OR as Rational Choice: A Decision and Game Theory Perspective*. Research Gate.
https://www.researchgate.net/publication/233576408_OR_as_rational_choice_A_decision_and_game_theory_perspective [diakses 5 April 2023].
- Sanger, David E. & Choe Sang-Hun. 2 September 2017. *North Korean Nuclear Test Draws U.S. Warning of 'Massive Military Response'*. New York Times.
<https://www.nytimes.com/2017/09/03/world/asia/north-korea-tremor-possible-6th-nuclear-test.html> [diakses 23 Juni 2023].
- Dewi, I.A. Alit Santika; Sushanti, Sukma; Parameswari, A.A. Ayu Intan. Juni 2021. Analisis Perubahan Kebijakan Kerja Sama Luar Negeri Argentina dengan Tiongkok dalam Bidang Pembangunan Nuklir. *DIKSHI (Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional)*, [S.l.], Vol. 1, No. 1, pp. 27-41, ISSN 2828-1853.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/74003> [diakses pada: 27 Aug. 2023]
- Smith, T. D., Hafner, M., Bennett, B. W. 2018. *Engaging With North Korea Lessons From Game Theory*. R and G.
- Snyder, Scott A. 20 November 2013. *The Motivations Behind North Korea's Pursuit of Simultaneous Economic and Nuclear Development*. Council Foreign Relations.
<https://www.cfr.org/blog/motivations-behind-north-koreas-pursuit-simultaneous-economic-and-nuclear-development> [diakses 24 Juni 2023].
- Snyder, Scott A. 21 Mei 2018. *North Korea's May 16, 2018 Statements and Their Implications for a Trump-Kim Summit*. Council Foreign Relations. [cfr.org/blog/north-koreas-may-16-2018-statements-and-their-implications-trump-kim-summit](https://www.cfr.org/blog/north-koreas-may-16-2018-statements-and-their-implications-trump-kim-summit) [diakses 10 Agustus 2023].
- Subakti, Putu Venia; Sushanti, Sukma; Suwecawangsa, Adi Putra. Mei 2022. Rasionalitas Indonesia Dalam Kebijakan Restriksi Ekspor Nikel Tahun 2020. *DIKSHI (Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional)*, [S.l.], Vol. 2, No. 2, pp. 221-235, ISSN 2828-1853.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/86899> [diakses pada: 27 Aug. 2023].
- Tracy, Abigail. 9 Januari 2018. *With New North Korea Strategy, Trump Administration Flirts With War*. Vanity Fair News.
<https://www.vanityfair.com/news/2018/01/bloddy-nose-north-korea-strategy-trump-administration-flirts-with-war> [diakses 25 Juni 2023].
- Wakefield, B., Hathaway, Robert M. 3 November 2010. *Revisiting History: North Korea and Nuclear Weapons*. Wilson Center.
<https://www.wilsoncenter.org/event/revisiting-history-north-korea-and-nuclear-weapons> [diakses 2 Juli 2023].